

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA DALAM DELIK PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks)**



**OLEH :  
MUHAMMAD NUR AIDIL  
B111 13 520**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA  
DALAM DELIK PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Hukum**

disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD NUR AIDIL  
B111 13 520**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA DALAM DELIK PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN.Mks.)

disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD NUR AIDIL**  
**B 111 13 520**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 31 Juli 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,



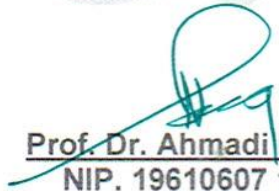
Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.  
NIP.19590317 198703 1 002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP.19661212 199103 2 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Aidil

NIM : B111 13 520

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Dalam Delik  
Penipuan ( Studi Kasus Putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/  
PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam tugas akhir ujian skripsi

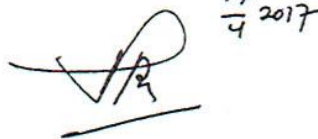
Makassar, April 2017

#### PEMBIMBING I



Prof.Dr.Muhadar.,SH.,MS  
NIP.195903171987031 002

#### PEMBIMBING II



Dr.Haeranah, SH.,MH  
NIP. 196612121991032 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

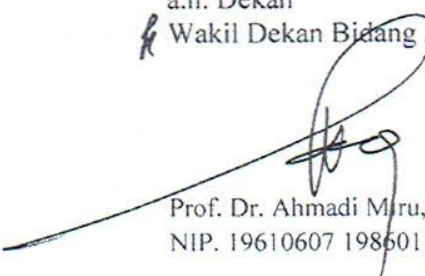
Nama : MUHAMMAD NUR AIDIL  
Nomor Pokok : B11113520  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Dalam Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No.533/Pid.B/2016/PN.Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

  
Prof. Dr. Ahmadi M. ru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003



## **ABSTRAK**

**Muhammad Nur Aidil, B11113520, Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Dalam Delik Penipuan ( Studi Kasus putusan Nomor: 533/ Pid.B/ 2016/ PN.MKS), dibawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Hj. Haeranah sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN.MKS dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan perkara No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN/Mks.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data penulis diperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan dengan masalah kasus penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, penerapan hukum pidana materil dalam perkara putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN/ Mks, terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan dua dakwaan yaitu dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan turut serta dalam delik penipuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan fakta- fakta hukum baik keterangan dari saksi- saksi maupun terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan turut serta dalam delik penipuan maka penerapan hukum materil pada perkara ini yakni Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP telah sesuai dan tepat. Kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan No. 533/ Pid.B/ 2016/ PN/ Mks, oleh majelis hakim terdakwa dipidana penjara 2 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan turut serta dalam delik penipuan pada Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dengan dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari segi pertimbangan yuridis, fakta- fakta persidangan, keterangan saksi- saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal- hal lain yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan sudah cukup dan telah menimbulkan rasa efek jera bagi pelaku terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang begitu berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan yuridis turut serta dalam delik penipuan ( Studi Kasus Putusan Nomor : 533/Pid.b/2016/PN.Mks)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan strata satu di fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Perlu diketahui bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak menutup kemungkinan di dalamnya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda MUZAKKIR AMRULLAH dan ibunda IDA SURYANI atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya dan demi keberhasilan penulis, beserta saudara kandung penulis yang tak hentinya memberikan bantuan terselesaikannya tugas akhir dan menjadi inspirasi bagi penulis, Kedua adik tersayang saya yakni NUR FITRIANI dan MUHAMMAD ZULFIKAR terima kasih atas doa dan semangat yang tak pernah hilang dari kalian berdua.

Pada program penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aristina pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I,Bapak Dr. Syamsuddin muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Hamzah Halim,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Muhadar,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Beserta seluruh anggota Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr. Muhadar,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Haeranah,S.H.,M.H selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah di berikan kepada penulis yang mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof Dr. H. Said Karim S.H., M.H., Bapak Imran Arief S.H.,M.S., Dan Ibu Dr. Hj. Nur Aziza, S.H.,M.H., selaku dari Tim penguji dalam pelaksanaan tugas



akhir. Terima kasih juga atas segala masukan dan saran yang bersifat membanguan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.H., selaku penasehat Akademik sekaligus sebagai ibu dalam menempuh pendidikan selama tiga tahun lebih di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu, nasehat-nasehat, dan tuntunanya. Taklupa penulis selalu mendoakan semoga sehat selalu dan penulis dapat merasakan segala kebaikan, walaupun telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya di dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Engkaulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada nilai dan batasnya.
8. Bapak dan Ibu pegawai akademik, petugas perpustakaan, dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
9. Ketua pengadilan negeri makassar, staf pengadilan negeri makassar Bapak Mustari S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak I Made subagia Astawa,S.H.,M.H.,selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi berlangsungnya kelancaran penelitian.
10. Kepada Teman-teman “ASAS 2013” yang menjadi saudara seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Kepada keluarga besar Hasanuddin Law Studi Center(“HLSC”) yang banyak mengajarkan saya banyak hal tentang hidup yang berwarna- warni, yang menjadi sosok penyemangat.
12. Keluarga KKN Reguler Gelombang 93 Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten sidenreng Rappang. Ibu dan Bapak Posko Di Kelurahan Toddang Pulu beserta Anak-anaknya,Terima kasih atas waktunya yang kurang lebih 45 Hari hidup bersama kalian.
13. Terima kasih pula kepada teman-teman sahabatku Ahmad Nur Ansyari, Rahmat Hidayat,Nurwati,Suryaningsih,Dan Febrianti Fransiska Massora yang menjadi teman jalan, dan yang selalu memberikan motivasi dan juga semangat.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman kampusku yaitu Andi Rahmiah Nanda, Irfani Fadhillah Achmad, Annas Arief Bachtiar, Indra Lesta Waspada, Dan Taufiq Hidayat yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari awal sampai dengan akhir ini.
15. Terima kasih juga kepada teman-teman sahabatku Fikri Surya,Muhammad Fajar, Muhammad Irsam j, Andi Febriyanti, Sustingsih Rahman Dan Siti hardiyanti R yang menjadi teman jalan,dan yang selalu memberikan motivasi dan juga semangat.



Demikian kata pengantar yang penulis buat, atas segala ucapan yang tak berkenaan serta tidak sempat penulis dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

Billahi taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2017

Muhammad Nur Aidil

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Delik dan Unsur Unsurnya.....	5
1. Pengertian Delik.....	5
2. Unsur-Unsur Delik .....	6
B. Jenis- Jenis Pidana dan Pemidanaan .....	11
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	11
2. Jenis- Jenis Pidana .....	12
3. Teori- teori Tujuan Pemidanaan.....	15
C. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur- unsurnya .....	22
1. Pengertian Delik Penipuan.....	22
2. Unsur-unsur Penipuan .....	23
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hakim .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Putusan No. 533/Pid.B/2016/PN.Mks .....	35
1. Posisi Kasus .....	35
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	37
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	40
4. Amar Putusan .....	40
5. Analisa Penulis.....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 533/Pid.B/2016/PN.Mks.....	45
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
2. Analisis Penulis.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang termaksud dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya di bandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat itu dapat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang menimbulkan berbagai macam masalah dan merugikan semua pihak yang membutuhkan penanganan serius dari segala hal. Salah satu masalahnya besar yang dihadapi bangsa

ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan di kota-kota besar bahkan sudah menjalar sampai pelosok desa. Perkembangan tindak kriminal, seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula. Tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat yang negatif selain akibat positif. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat bahkan Negara.

Masalah kejahatan delik penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari tindak kejahatan penipuan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa kejahatan penipuan. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan kejahatan penipuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

KUHP sendiri dalam Pasal 378 ditentukan ancaman pidana bagi kejahatan penipuan. Walaupun demikian ancaman pidana dalam undang-undang dirasakan tidak efektif dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana, karena itu dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan dianutnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan.

Tindak pidana yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah masalah Tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1). Dimana pada putusan yang dibahas atau yang diambil adalah “Melakukan tindak penipuan secara bersama-sama dimana terdakwa bernama Rante

Tagiri secara bersama-sama dengan Amiruddin alias Andi dan Harianto Dg. Manga bin Humbali Pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Rutan Makassar”. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam delik penipuan pada Putusan No.533/pid.B/2016/ PN.Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 533/Pid.B/2016/PN.Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil kasus delik penipuan Pada Putusan No.533/Pid.B/2016/PN.Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan delik Penipuan Pada Putusan No.533/Pid.B/2016/PN.Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai penerapan ketentuan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana penipuan dalam Perkara Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN.Makassar.
2. Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN.Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Delik dan Unsur- Unsurnya**

##### **1. Pengertian Delik**

Dalam hukum Pidana, delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana. Peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut.

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.”<sup>1</sup>

Menurut Van der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan” kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang

---

<sup>1</sup> Departement pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.

supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur Tindak Pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi<sup>2</sup> mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela, namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada Kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## **2. Unsur-unsur Delik**

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid<sup>3</sup> bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:

---

<sup>2</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. Hlm 396- 397.

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
  - a. Memakai nama palsu
  - b. Memakai kedudukan palsu
  - c. Memakai tipu muslihat
  - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. unsur-unsur tindak pidana penipuan <sup>4</sup> adalah sebagai berikut :
  1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
  2. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu, ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
  3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
    - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
    - b. Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak

---

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin Farid ,*Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar grafika,1995.

<sup>4</sup> Moeljatno,1983, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.<sup>5</sup>

## 2. Menggunakan tipu muslihat

tipu muslihat yaitu perbuatan dengan menggunakan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain, sehingga orang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak orang tersebut dan seseorang menjadi percaya dan yakin atas kebenarannya dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termaksud menunjukkan surat-surat yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat menjadi perbedaaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman<sup>6</sup>

## 3. Menggunakan rangkaian kata bohong

Rangkaian kata bohong yaitu sesuatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau percaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima oleh orang sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata yang diucapkan membenarkan katayang satu atau memperkuat kata yang lain.

## 4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana.

---

<sup>5</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian khusus*, Terjemahan oleh Hasnan Bina cipta, Bandung, 1986, Hlm. 147

<sup>6</sup>Ibid., Hlm 155.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi, selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat sebagai berikut :

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.

3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

Menurut Sudarto menyatakan bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau merumuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karna tulisan ini berkisar pada Hukum Pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempuyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*<sup>7</sup>.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan misalnya berakhirnya dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan itu dianggap baik, dan sebaiknya. Ketika berakhir dengan penjatuhan pidana tidak berjalan sesuai asas peradilan, maka akan dicap akan adanya kemerosotan kewibawaan hukum.

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penintensier Indonesia, CV Armico, Hlm.4

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada akalnya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karna hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Mencantumkan Pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: Tindak Pidana), disamping itu bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum Pidana.<sup>8</sup>

Di bawah ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa pakar/ ahli hukum diantaranya<sup>9</sup>:

Menurut Sudarto mengatakan bahwa :

“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu”.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

“Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara pada pelaku delik itu”.

Menurut Pompe mengatakan bahwa :

“Semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu”.

Menurut Simsons mengatakan bahwa:

“Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Dan

---

<sup>8</sup> Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, Hlm. 24

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Hlm. 2



juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut”.

Menurut Van Hattum mengatakan bahwa :

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana”.

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok terdiri dari:

### **1. Pidana mati**

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak tertinggi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai dari sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Dalam KUHP kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang di pandang sangat berat saja. Yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat(2), Pasal 124 ayat(3) Jo. Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor- faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang di sertai dengan faktor yang memberatkan (Pasal 365 ayat(4), Pasal 368 ayat(2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444). Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus

dengan berhati- hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan diancam dengan hukuman pidana mati, selalu di alternatifkan, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi tingginya 20 tahun.

## 2. Pidana Penjara

Andi Hamzah menegaskan bahwa:<sup>10</sup>“pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan itu hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantum dalam Pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun)”.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak- hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan di pilih (dalam kaitanya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika saja dalam seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu: Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana kehilangan beberapa haknya.

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, mahakarya Rangkang, Yogyakarta, Hlm.110

### 3. Pidana Kurungan

Menurut Vos menyatakan bahwa pidana kurungan pada dasarnya mempunyai tujuan yaitu:<sup>11</sup>”pertama ialah sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik kulpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu ( Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana ( Pasal 396 KUHP).”

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat(1) KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti ini dikemukakan, pidana kurungan diancamkan oleh kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik pelanggaran.

Ninie Suparni mengemukakan: “Pidana kurungan adalah bentuk- bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang.”<sup>12</sup>

### 4. Pidana Denda

Merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setara dengan pidana. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena itu ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Lamintang mengemukakan bahwa :

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam buku II dan buku III KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satunya-satunya pidana

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Hlm 202

<sup>12</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.23

pokok maupun alternatif dengan pidana penjara saja. Ataupun dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.<sup>13</sup>

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat di jatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accessories* yang mengikuti pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu Pasal 250, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP. Pidana tambahan terdiri atas:

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman putusan Hakim.

### 3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam Bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa

---

<sup>13</sup>Op cit., Hlm.114

nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>14</sup> menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidanakan seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto<sup>15</sup> :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin<sup>16</sup> mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, 2005.

<sup>15</sup> Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Hlm. 30.

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Hlm. 51.

2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.<sup>17</sup>

Sementara itu menurut Muladi<sup>18</sup> tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

---

<sup>17</sup> Andi Abu Ayyub Saleh, *Jenis Dan Tujuan Pemidanaan*, Hlm 10.

<sup>18</sup> Muladi, 2004, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Hlm. 51.

Berkaitan dengan pembedaan, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>19</sup>

Menurut Thomas Aquinas teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori pembalasan menurut Thomas Aquinas terbagi menjadi 2 yaitu :<sup>20</sup>

- A. Teori pembalasan yang objektif yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus di balas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan.
- B. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini, kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapatkan balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar di sebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya di jatuhi pidana yang ringan.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2005, *teori absolut Pidana*, refika Aditama, Jakarta, Hlm. 31

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 142



## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada, upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen<sup>21</sup> ”Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.”

Mengenai tujuan- tujuan tersebut terdapat tiga teori yaitu:

### 1. Untuk menakuti

Teori dari Anselm von Veurba berpendapat bahwa :<sup>22</sup>

“Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang- kadang merupakan siksaan.”

### 2. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum

---

<sup>21</sup> Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 26.

<sup>22</sup> Ibid., Hlm. 143

### 3. Untuk melindungi

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat itu.

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut.

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe menyatakan :

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos "Pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Menurut Adami Chazawi teori gabungan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar yaitu :<sup>23</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

### **C. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur- Unsurnya**

#### **1. Pengertian Delik Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm.142

a. Penipuan Menurut Tata Bahasa

Penipuan dalam kamus bahasa indonesia disebutkan bahwa:<sup>24</sup> ”Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur ( bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat penipuan adalah kedua belah pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau yang membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.”

b. Menurut KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur- unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

”Barangsiapa dengan maksud untuk menggutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”

**2. Unsur- unsur Penipuan**

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam bab XXV buku II Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.166

<sup>25</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, Hlm.364

Dalam 20 pasal, masing- masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada bab XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur- unsur pokok sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan hukum. Pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi.

Dengan demikian, maksud tersebut adalah ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu lebih alat penggerak penipuan ( nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara- cara pelaku penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun demikian perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- 2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau

keyakinan atas kebenaran dari suatu orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan tapi melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak- hak kepada orang yang dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian kata bohong

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad<sup>26</sup> dalam Arrest 11 Maret 1929, bahwa:

”Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata- kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata- kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah- olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian.”

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas HogeRaad<sup>27</sup> dalam Arrest 16 Oktober 1922, bahwa :

”Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu juga dapat dilakukan melalui seseorang perantara, yakni tidak

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, Hlm, 159

<sup>27</sup> Ibid., Hlm.151



dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan penyerahan tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab akibat antara supaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda yang bersangkutan.”

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. hakim memperhatikan syarat yang dapat dipidana, yaitu syarat subjektif dan objektif .

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam keputusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana, merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedang faktor non hukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu, hakim yang diberikan kewenangan yang diberikan dalam memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberi putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat(1) KUHP yang berbunyi:

”Pertimbangan disusun secara ringkas seringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi 2 (dua) kategori yakni:<sup>28</sup>

”Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pada Pasal 58 dan Pasal 52 naskah rancangan KUHP baru hasil penyempurnaan intern departemen Kehakiman dapat dijadikan referensi.

Menurut Bambang Waluyo dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kesalahan pembuat Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. Cara melakukan Tindak Pidana
- d. Sikap batin pembuat pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap Tindak Pidana yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 94

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 91

- i. Pengurus tindak pidana yang korban atau keluarga korban
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormataan, dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

## **E. Penyertaan**

### **a. Pengertian Penyertaan**

Kata "penyertaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta ( mengikuti). Kata "penyertaan" berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu Tindak Pidana dapat terjadi dalam hal :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut.
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang itu mewujudkan delik.

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan secara bersama oleh

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.

beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

#### **b. Bentuk-bentuk Penyertaan**

Menurut Adami Chazawi<sup>31</sup> bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichige* (pembuat pembantu), Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Hlm.82

a. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Menurut Adami Chazawi<sup>32</sup> *pleger* adalah orang yang karena perbuatan nyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini, Tindak Pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *deder* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

Sementara Amir Ilyas dan Haeranah, dkk<sup>33</sup> pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi, sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan unsur-unsur atau elemen dari Tindak Pidana.

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (*Doen pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan *Doen pleger*.

Menurut Kanter dan Sianturi<sup>34</sup>, penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.

Sementara menurut Wirjono Prodikoro<sup>35</sup>, menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan Tindak Pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi, sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belakang yang dikendalikan oleh sipeyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Hlm.85

<sup>33</sup> Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012, *Bentuk- Bentuk Penyertaan*, Hlm.60.

<sup>34</sup> Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Hlm.342.

<sup>35</sup> Wirjono Prodikoro, 2003, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Hlm.118.

dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si peyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

c. Mereka yang turut serta Melakukan ( *Medepleger*)

Dalam hukum pidana KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu Tindak Pidana tetapi hal ini didalam praktek-praktek pendapat, melalui pengadilan maupun doktrin dari pakar Hukum Pidana.

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan ( *Uitlokker*)

Adami Chazawi <sup>36</sup> orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctorintellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan Tindak Pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat(1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah ”mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Hlm 112.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di kota Makassar.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi pada Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini atas instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penelitian pustaka ( *Library Research* ) Adalah penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. Penelitian lapangan ( *Field Research* ) Adalah penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

##### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan, wawancara langsung dengan para informan di dalam instansi yang bersangkutan terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti undang-undang, arsip data dari instansi yang



bersangkutan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Penulis dalam menganalisa data yang dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan- permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan ini, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam perkara Pidana No.533/Pid.B/PN.Mks.**

##### **1. Posisi Kasus**

Pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, Bertempat di Rutan Makassar kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 29 oktober 2015, terdakwa Rante Tagiri menerima langsung 1(satu) unit mobil Avanza warna silver dari tangan saksi korban Lk.Umar Hamid
- Sebelum kejadian tersebut, saksi Lk.Bernard menawarkan kepada saksi korban Lk. Umar Hamid dengan mengatakan bahwa “ ada temannya yang membutuhkan mobil rental” dan karena mobil saksi Lk. Bernard sudah ada yang pakai sehingga saksi korban Lk.Bernard menawarkan kepada saksi korban Umar Hamid dan jika saksi Umar Hamid bersedia, maka Lk.Bernard akan memberikan nomor handphone orang yang mengaku namanya Pr Herlin yang adalah Pr.Faridah yang menyamar sebagai Pr Herlin.
- Kemudian saksi korban menghubungi Pr.Herlin ( Pr.Faridah) dan saat itu Pr.Herlin (Pr.Faridah) menyuruh untuk mengantarkan mobil di Rutan

Makassar sehingga saksi korban Umar Hamid mengantarkan 1(satu) unit mobil avanza warna silver no.pol. DD 898 is no.rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641 di Rutan Makassar dan di terima langsung oleh terdakwa Rante Tagiri lalu terdakwa memberikan uang kepada Umar Hamid sebagai uang rental mobil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 2 november 2015 Pr. Herlin ( Pr.Faridah) kembali menelpon saksi korban untuk mengganti mobil dengan alasan mobil sebelumnya sudah tua dan rencananya akan digunakan oleh ka Rutan Makasar lalu anak umar hamid yaitu Lk.Syahrul mengantarkan 1(satu) unit mobil merek toyota avanza warna putih di Rutan Makassar dimana mobil tersebut di terima oleh seorang laki-laki suruhan Pr.Herlin/ Pr.Faridah dan Lk. Syahrul diberikan uang rental mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah terdakwa menerima mobil dan memberikan uang rental kepada Umar Hamid, terdakwa lalu menemui Lk.Akmal (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual mobil tersebut, karena Lk.Akmal mempunyai teman yang mau membeli mobil yaitu Lk.Harianto Dg.Mangka (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Setelah terdakwa bertemu dengan Lk.Harianto Dg.mangka, terdakwa kemudian menyepakati harga jual 1(satu) unit mobil avanza warna silver no.pol. DD 898 is no. rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan di pos penjagaan Rutan Makasaar pada tanggal 29 oktober 2015 sekitar pukul 17.30 wita dan disaksikan oleh Lk.Akmal.Setelah serah terima uang dan kunci mobil antara terdakwa Lk.Harianto Dg.Mangka, Lk.Akmal lalu meminta fee kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan fee kepada Lk.Akmal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Pada saat terdakwa menerima kunci mobil dan kemudian terdakwa memberikan uang sewa rental kepada saksi korban Umar Hamid yang pada

akhirnya mobil terdakwa tersebut dijual,pada saat itu terdakwa sedang ditahan di Rutan Makassar atas kasus penggelapan mobil.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk.Ahmad Amiruddin alias Andi dan Lk Harianto Dg.Mangka bin humbali ( perkaranya diajukan secara terpisah), saksi korban Umar Hamid mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-533/MKS/Epp.2/03/2016 adalah sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

- Bahwa ia terdakwa Rante Tagiri secara bersama-sama dengan Lk.Ahmad Amiruddin alias Andi dan Lk. Harianto Dg. Mangka bin Humbali (perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 29 oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2015, bertempat di Rutan Makassar kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepada orang lain, atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, mereka melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada tanggal 29 November 2015, terdakwa menerima langsung 1(satu) unit mobil avanza silver dari tangan saksi korban Umar Hamid
- sebelum kejadian tersebut, saksi Lk.Bernard menawarkan kepada saksi korban Umar Hamid dengan mengatakan bahwa”ada temannya yang

membutuhkan mobil rental” dan karena saksi korban Lk.Bernard sudah ada yang dipakai sehingga saksi Lk.Bernard menawarkan kepada saksi Umar Hamid dan jika saksi Umar Hamid bersedia, maka Lk.Bernard akan memberikan nomor handphone orang yang mengaku namanya Pr.Herlin yang adalah Pr.Faridah yang menyamar sebagai Pr.Herlin

- Kemudian saksi korban menghubungi Pr.Herlin ( Pr Faridah) dan saat itu Pr. Herlin (Pr.Faridah) menyuruh mengantarkan mobil di Rutan Makassar sehingga saksi korban Umar Hamid mengantarkan satu1 ( satu) unit mobil avanza warna silver no.pol. DD 898 is no. rangka mhfmmlba3jaak221998, no mesin DF35641 di Rutan Makassar dan diterima langsung oleh terdakwa Rante Tagiri lalu terdakwa memberikan uang kepada .Umar Hamid sebagai uang rental mobil sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus rupiah).
- 3(tiga) hari kemudian pada tanggal 2 November 2015 Pr.Herlin (Pr.Faridah) kembali menelpon saksi korban untuk mengganti mobil dengan alasan mobil yang sebelumnya sudah tua dan rencananya akan digunakan oleh ka Rutan Makassar lalu anak umar hamid yaitu Lk.Syahrul mengantarkan 1(satu) unit mobil merek toyota avanza warna putih di Rutan Makassar dimana mobil tersebut diterima oleh seorang laki-laki suruhan Pr.Herlin/ Pr.Faridah dan Lk.Syahrul diberikan uang rental mobil sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Setelah terdakwa menerima mobil dan memberikan uang rental kepada Umar Hamid, terdakwa lalu menemui Lk.Akmal(Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual mobil tersebut, karena Lk.Akmal mempunyai teman yang mau membeli mobil yaitu Lk.Harianto Dg.Mangka.
- Setelah terdakwa bertemu dengan Lk.Harianto Dg.Mangka, terdakwa kemudian menyepakati harga jual 1(satu) unit mobil avanza no.pol. DD 898 is no. rangka mhfm1ba3jaak221998,no mesin DF35641 senilai Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) yang diserahkan di Pos penjagaan Rutan Makassar pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 wita dan

disaksikan Lk.Akmal. Setelah serah terima uang dan kunci mobil antara terdakwa dan Lk.Harianto Dg Mangka. , Lk.Akmal lalu meminta fee kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan fee kepada Lk.Akmal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada Lk.Akmal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Dan selebihnya terdakwa pergunakan sendiri.
- Terdakwa pernah memberikan uang uang kepada tahanan kasus tipikor yaitu Pr. Muliati untuk diserahkan kepada Pr.Fitri (yang diakui adiknya) sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang menunggu diportir Rutan kelas IA Makassar.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk.Ahmad Amiruddin alias Andi dan Lk.Harianto Dg Mangka. bin Humbali (perkaranya diajukan secara terpisah),saksi korban Lk.Umar Hamid mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal378 KUHP Jo.Pasal 55Ayat(1) ke-1 KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register perkara : PDM-226/MKS/Epp.2/03/2016 tertanggal 18 mei 2016 yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rante Tagiri, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Rante tagiri dengan pidana selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1(satu) lembar kwitansi pembelian mobil sebesar Rp.70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

### **4. Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara tersebut

- Menyatakan terdakwa Rante Tagiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama”
- Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan
- Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) lembar pembelian mobil sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan kepada korban.
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

## 5. Analisa Penulis

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum . sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. Dalam praktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi ada dimensi tentang *locus dan tempus delicti, modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dipersidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian dipertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang membantu lancarnya proses hukum dan tentu saja dampak tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam proses penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, hakim juga memperhatikan pandangan masyarakat sekitar jangan sampai putusan dijatuhkan oleh hakim tersebut memberikan perspektif negatif terhadap hukum kita sendiri. Menurut penulis hakim disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah



dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan itu sendiri dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Rante Tagiri sebagai manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang diatas, maka “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur”dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan perbuatan terdakwa yang merental mobil dan menerima kunci mobil yang juga mobil dari saksi korban Lk.Umar Hamid kemudian terdakwa menjual mobil tersebut. Berdasarkan fakta diatas maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menyakini secara hukum. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar adalah terdakwa Rante Tagiri bersama dengan Ahmad Amiruddin alias Andi dan Lk.Harianto Dg.Mangka bin Humbali dimana setelah terdakwa menerima kunci mobil beserta mobil dari saksi korban, terdakwa kemudian menemui Lk.Andi Akmal dan mengatakan bahwa ada mobil,tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000( Dua puluh juta rupiah) beberapa jam kemudian terdakwa diberitahukan oleh Andi Akmal bahwa ada yang berniat menerima gadai mobil tersebut setelah terdakwa bertemu dengan Harianto Dg.Mangka, terdakwa kemudian menyepakati harga jual 1(satu) unit mobil avanza warna silver no.pol. DD 898 is no. rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641 senilai Rp.18.000.000(Delapan belas juta rupiah), kemudian Andi Akmal kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000(Dua juta rupiah) yang mana uang itu berasal dari Harianto Dg.Mangka sebagai tanda jadi sambil menggu kunci mobil yang akan dibawakan .Bahwa hasil dari penjualan

mobil tersebut terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sendiri, sedangkan andi akmal berperan untuk membantu terdakwa mencari orang mau membeli mobil dan mendapatkan imbalan dari hasil penjualan mobil tersebut dan Harianto Dg.Mangka juga membantu terdakwa menjual mobil tersebut kepada Ramli Dg.Rewa,lalu Lk.Ramli Dg.Rewa berperan menerima mobil tersebut.

Dengan demikian unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk. Bahwa pada saat saksi korban meminta kembali mobil tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikannya dan terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil tersebut dan andi akmal berusaha membantu mencari mobil tersebut, tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban. Dan setelah sedemikian lama saksi korban menunggu mobilnya dikembalikan waktu yang terdakwa hanya berjanji saja dan terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi korban mersa tertipu dan telah dirugikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ahmad Amiruddin alias Andi dan Harianto Dg.Mangka bin Humbali, saksi korban Umar Hamid mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang ,bahwa dengan demikian unsur “dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Telah terpenuhi dan secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan secara bersama

sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP. Oleh karna itu kepada terdakwa adalah wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa ( Rante Tagiri) . Menurut analisis penulis ,sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada putusan No.533/Pid.B/2016/PN.Mks**

**1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni:

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa secara lisan tertanggal 29 Maret 2016 yang pokoknya memohon keringanan hukuman, Penuntut umum bertetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 21 Maret 2016 dengan nomor perkara : PDM-226/Mks/Epp.2/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa rante tagiri pada tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di Rutan Makassar Kota Makassar yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan
- Terdakwa mengenalnya pada akhir bulan Oktober tahun 2015, ketika saksi menerima kunci mobil avanza warna silver darinya.
- Karena yang menelpon ke Umar Ahmad adalah Pr. Farida untuk menyewa kedua mobil tersebut.
- Terdakwa tahu, yaitu Pr Farida yang merupakan mantan narapidana kasus penipuan dan penggelapan mobil.
- Terdakwa tidak tahu berapa kali Pr.Farida mengaku sebagai Pr.Herlin untuk menghubungi Lk.Umar Ahmad

- Terdakwa menerima 1 unit mobil avanza warna silver di Rutan Makassar tanggal 29 Oktober 2015
- Terdakwa tidak pernah menerima 1 unit mobil toyota avanza warna putih.
- Terdakwa menerima mobil tersebut dan saksi memberikan uang kepada Pr.Muliyati sebesar Rp.16.000.000 karena menurut keterangan Pr.Farida dari Lk.Umar Ahmad merupakan miliknya dan berencana dijual kepada terdakwa.
- Terdakwa menjual mobil kepada Harianto dan Akmal dengan harga Rp.18.000.000 yang pada saat itu Harianto memberikan uang tersebut.
- Karena terdakwa Rante Tagiri mengira mobil tersebut milik Pr. Farida yang mau dijual dan saksi menjual kembali mobil tersebut karena membutuhkan uang.
- Uang penjualan yang saksi berikan kepada Pr.Fitri atas perintah Pr. Farida kemudian Rp.1.000.000 saksi berikan kepada Akmal untuk uang jasa, dan Rp.1.000.000 sisanya terdakwa pergunakan selama di Rutan Makassar.
- Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan terdakwa berikan semua benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1) KUHP

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaanya jaksa penuntut umum telah mendengarkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Umar Hamid

- Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan

- Kejadian sekitar tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil merek toyota avanza 1300 G, no.pol DD 898 is, no. rangka mhfm1ba3jaak221998, no.mesin DF35641, warna silver metalik di Rutan Makassar dan diserahkan kepada terdakwa Rante Tagiri.
- Yang menghubungkan antara saksi dengan terdakwa Rante Tagiri adalah Bernard, karena Bernard pernah disewa mobilnya oleh perempuan yang mengaku bernama Herlin sebanyak 2(dua) kali ketika dibutuhkan lagi mobil Bernard digunakan sehingga mengalihkan kepada saksi.
- Pada pertengahan bulan Nopember 2015 saya bersama anak saksi datang ke Rutan makassar untuk menayakan mobil tersebut kepada terdakwa Rante Tagiri, kemudian terdakwa Rante Tagiri mengakui bahwa mobil tersebut telah dijual melalui Ahmad dan terdakwa Rante bersedia mengembalikan mobil tersebut, namun sampai sekarang belum dikembalikan.
- Yang menerima mobil tersebut adalah laki-laki (dengan ciri-ciri gemuk, kulit berwarna sawo matang, rambut cepak) saksi tidak mengenal orangnya yang mengaku orang suruhan Pr. Herlin
- Saksi bersama anak saksi melakukan konfirmasi terhadap Herlin mengenai transaksi sewa mobil di Rutan Makassar yang mengatasnamakan dirinya Pr.Herlin tidak mengetahui hal tersebut dari konfirmasi tersebut kami baru mengetahui jika yang mengelapkan satu unit mobil milik saksi adalah terdakwa Rante Tagiri dan Ahmad Amiruddin
- Untuk toyota avanza 1300 G warna silver metalik yaitu 1 BPKB yang masih berada di BCA Finance, jl. Ratulangi Kota Makassar, dan untuk mobil toyota new avanza warna putih yaitu 1 buah BPKB yang dijaminkan di klippan Finance jl. Lanto Dg. Pasewang, Kota Makassar.
- Saksi dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

## 2) Saksi Syahrul Hasyim Umar

- Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita Lk. Umar Hamid menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza 1300 G,no.pol DD 898 is, no. rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641, warna metalik di Rutan Makassar dan di serahkan terdakwa Rante Tagiri.
- Yang melakukan penipuan adalah terdakwa Rante Tagiri dan Ahmad Amiruddin alias Andi akmal dan korban adalah ayah saksi.
- Terdakwa melakukan penipuan adalah Bernard memberikan nomor handphone Herlin kepada Umar Ahmad menghubungi herlin lalu Pr. Herlin menyuruh mengantar mobil tersebut ke Rutan Makassar sehingga Umar Ahmad mengantarkan 1 unit mobil merk toyota avanza 1300 G, no.pol DD 898 is, no rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641, warna metalik Ke Rutan Makassar dan di terima oleh sdri. Rante Tagiri, kemudian Lk. Umar Ahmad langsung di berikan uang sewa sebesar Rp. 1.100.000, setelah 3 hari kemudian tepat tanggal 2 November 2015 Pr.Herlin menghubungi Lk. Umar Ahmad untuk meminta mengganti mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut dengan alasan mobil yang sebelumnya sudah tua dan rencananya akan dipakai oleh Ka Rutan Makassar, lalu saksi mengantarkan 1 unit mobil toyota new avanza, no.pol DD 16 ur no.rangka mhkm1ba3jck017007, no.mesin DK10914, warna putih di Rutan Makassar, saksi menyerahkan mobil tersebut kepada seorang laki-laki suruhan Pr.Herlin lalu saksi di berikan uang sewa sebesar Rp.1.000.000 tetapi mobil tersebut tidak di ganti dengan alasan kedua mobil tersebut akan digunakan semuanya, setelah 4 hari kemudian Lk.Umar Ahmad mencoba menghubungi Herlin tetapi handphone sudah tidak aktif lagi dan mobil belum dikembalikan sampai saat ini.
- Pada awal bulan November Umar Ahmad dan saksi datang ke Rutan Makssar untuk menayakan perihal 1(satu) unit mobil merk toyota avanza tersebut kepada terdakwa Rante Tagiri, kemudian terdakwa Rante Tagiri mengakui bahwa mobil tersebut telah dijual melalui terdakwa Ahmad Amiruddin, dan

terdakwa Rante Tagiri bersedia mengembalikan mobil Umar Ahmad tetapi sampai saat ini mobil tersebut belum kembali.

3) Saksi Bernadus Boli Tukan

- Benar saksi mengenal dengan Umar Hamid sejak bulan Oktober 2015 dalam hal hubungan pinjam meminjam mobil rental, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Pernah dulu ada pegawai Rutan Makassar yang merental mobil saksi.
- Terhadap terdakwa Rante Tagiri, Ahmad Amiruddin alias Andi Akmal Makkawaru, dan Harianto Dg.Mangka bin Humbali saksi tidak kenal, tidak pernah berhubungan dengannya, tidak ada hubungan keluarga dan atau pekerjaan dengannya.
- Setelah saksi dipertemukan oleh penyidik dengan saksi Pr.Herlin yang adalah pegawai Rutan Makassar, saksi mengatakan bahwa orang yang mengaku Herlin bukan perempuan Tersebut yang saksi temui sebelumnya.
- Benar saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan (Pr. Herlin) yang diperlihatkan oleh penyidik di kepolisian.
- Benar saksi yang mengetahui identitas mobil milik Umar Hamid yang hilang yaitu jenis mobil avanza warna silver ( pertama ) dan mobil avanza warna Putih(Kedua).
- Saksi membenarkan semua keterangannya.
- Benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

4) Saksi Eko Yuono

- Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan.
- Saksi mengetahui tentang pengajuan kredit atas 1 unit mobil toyota avanza 1300 G no.pol DD 898 IS, no rangka mhfm1ba3jaak221998, no mesin DF35641.
- Yang mengajukan kredit BCA Finance yaitu Pr. Megawati.



- Saksi tidak mengetahui apakah Umar Hamid pernah membayar angsuran kredit tersebut.
- Benar, 1 buah BPKB mobil yang di simpan di BCA Finance.
- Untuk keberadaan mobil tersebut saat ini, apakah saksi mengetahui.
- Benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP.

5) Saksi Herlin Ari Gasong

- Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penipuan.
- Saksi baru kenal dengan Umar Hamid karena pernah datang sekitar hari minggu bulan November 2015 siang hari kepada saksi untuk menginformasikan masalah pemakaian mobil yang saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun tidak ada hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengannya.
- Sejak bulan Oktober 2015 dalam hal hubungan pinjam-meminjam mobil rental, tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Saksi mengenal terdakwa Rante Tagiri karena merupakan tahanan Rutan kelas 1 Makassar karena bermasalah dengan hukum dalam perkara penggelapan mobil, namun tidak ada hubungan dengannya, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak pernah menghubungi Umar Hamid untuk merental mobil.
- Yang merental mobil korban adalah terdakwa Rante Tagiri karena pada saat saksi mempertemukan Umar Hamid dengan terdakwa Rante Tagiri, pada saat itu Umar Hamid menunjuk bahwa terdakwa Rante Tagiri sebagai orang yang merental mobilnya.
- Saksi mengenalnya Faridah karena pernah ditahan di Rutan Makassar sekitar awal tahun 2014.
- Benar, saksi tidak pernah melakukan transaksi rental mobil dengan Lk. Umar Hamid.

6) Saksi Mulyati binti Marzuki Yasir

- Saksi tidak mengenal korban, tetapi saksi mengenal terdakwa Rante Tagiri karena pernah di bina di Rutan kelas 1A Makassar, Lk.Ahmad saksi kenal karena merupakan tahanan Rutan kelas 1A Makassar, tetapi Harianto saksi tidak mengenal.
- Saksi tidak mengenal mobil yang pernah di jual oleh terdakwa yakni Rante Tagiri kepada Lk. Dg. Rewa.
- Terdakwa Rante Tagiri pernah meminta tolong kepada saksi, saksi yang menerima uang diserahkan kepada seorang perempuan yang diakui sebagai adiknya yang menunggu di portir Rutan kelas 1A Makassar.
- Saksi tidak mengingat lagi berapa jumlahnya karena di bungkus dengan plastik adapun warna palstiknya saksi sudah lupa untuk pecahan uang tersebut saksi juga tidak melihatnya dan saksi menerima uang tersebut akhir tahun 2015.
- Saksi tidak tahu, karena saksi hanya membantu menyerahkan uang tersebut kepada adik terdakwa.
- Saksi tidak menerima upah dari terdakwa Rante Tagiri, sedangkan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan uang tersebut di serahkan kepada perempuan yang di akui terdakwa Rante Tagiri sebagai adiknya.
- Saksi tidak mengenal namun ciri-cirinya adalah seorang perempuan yang menggunakan jilbab, menggunakan behel gigi, kulit sawo matang, umur sekitaran 20-30 tahun, tinggi sekitar 150 cm.
- Benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi di berikan semua benar.

7) Saksi Ahmad Amiruddin alias Akmal

- Pada akhir bulan Oktober 2015, saksi di beritahukan oleh terdakwa Rante Tagiri bahwa ada mobil yang mau di gadai sebesar Rp. 20.000.000 kemudian

terdakwa memberitahukan kepada Harianto, kemudian saksi di pertemuan dengan Ramli Dg. Rewa dan terjadi kesepakatan pada saat itu .

- Pada akhir bulan Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi menerima uang dari Harianto sebesar Rp.20.000.000 di depan ruang besukan, dan uang Rp.3.000.000 saksi terima di blok A2 Rutan Makassar, kemudian saksi serahkan dalam 2 tahap kepada terdakwa Rante Tagiri, pertama sebesar Rp.20.000.000 di depan pos blok wanita, kedua sebesar Rp.18.000.000 di depan blok wanita ke terdakwa Rante Tagiri, uang dengan sebesar Rp.3.000.000 yang saksi terima dari Harianto saksi tidak setorkan ke Rante Tagiri tetapi saksi gunakan sendiri dan semuanya diserahkan dalam waktu kurang dari 1 hari.
- Mobil tersebut merupakan milik terdakwa rante sesuai pengankuannya, tetapi setelah ber perkara saat ini saksi baru mengetahui mobil tersebut milik Umar Hamid.
- Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 dari keuntungan dari gadai hasil mobil tersebut.
- Peran terdakwa Rante Tagiri adalah menerima kunci dari korban lalu menggadai mobil tersebut ke Ramli atas bantuan saksi dan Harianto.
- Peran saksi yaitu mencari orang yang mau menerima gadai, lalu saksi mendapatkan Harianto yang mau mencarikan orang yang menerima gadai dan memperkenalkan saksi dengan ramli yang bersedia menerima gadai sehingga mobil milik Umar Hamid beralih penguasaan terdakwa Rante Tagiri ke Lk. Ramli.
- Saksi menyesal dan merasa bersalah atas kejadian tersebut.

8) Saksi Harianto Dg.Mangka bin Humbali

- Saksi mengenal terdakwa Rante Tagiri sekitar bulan Oktober 2015 ketika di perkenalkan oleh Andi Akmal, tetapi saksi tidak mengenal korban.

- Pada akhir bulan Oktober 2015, saksi di hubungi oleh Akmal untuk memberitahukan bahwa ada mobil avanza yang mau di gadai karena saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menghubungi teman a.n Lk.Dg.Rewa setelah saksi memberitahukan persoalan tersebut, Lk.Rewa hanya menyanggupi uang sebesar Rp.25.000.000 namun Lk.Dg. Rewa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000 kepada saya, untuk saksi serahkan terdakwa Rante Tagiri dengan alasan Dg. Rewa tidak bisa masuk kedalam blok wanita.
- Pada akhir Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi menerima uang dari Ramli sebesar Rp.20.000.000 didepan ruang besukan, dan Rp.3.000.000 saksi terima di blok A2 Rutan Makassar, kemudian saksi serahkan dalam 3 tahap kepada saksi Akmal, pertama sebesar Rp.2.000.000 di blok wanita, kedua sebesar Rp.18.000.000 di depan blok wanita dan ketiga sebesar Rp.3.000.000 di jalan masuk blok wanita dan semuanya diserahkan dalam kurung waktu 1 hari.
- Mobil tersebut merupakan milik terdakwa Rante Tagiri sesuai pengakuannya, tetapi setelah berperkara saat ini saya baru mengetahui bahwa jika mobil tersebut milik Lk.Umar Hamid.
- Saksi memiliki keuntungan dari hasil gadai mobil tersebut.

## **2. Analisis Penulis**

Seperti yang dijelaskan dalam amar putusan, terlihat bahwa hukum mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur delik yang didakwakan, ditambahkan hakim harus meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsu-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh Bapak I Made Subagia Astawa, S.H,M.H., menerangkan bahwa pada putusan tersebut dijatuhkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP tentang melakukan tindak penipuan secara bersama-sama. Selanjutnya majelis hakim menimbang apakah ada alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan dasar untuk menghapus pidana terdakwa. Maka dari itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa umum, hal ini disebabkan oleh adanya hal-hal yang meringankan terdakwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut lagi menurut Hakim I Made Subagia Astawa, S.H M.H., adapun hal-hal yang meringankan terdakwa selama perkara antara lain ialah :

a)Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

b)Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

c)Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang ada didalam persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka majelis hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum pidana dalam putusan perkara No : 533/Pid.B/2016/PN/Mks adalah sudah tepat, karena Surat Dakwaan telah memenuhi syarat formil pada Pasal 142 (2) KUHP huruf (a), memenuhi syarat materil dalam Pasal 142 (2) huruf (b), dan unsur-unsur delik yang didakwakan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana pelaku dalam perkara ini adalah sudah cukup memuat alasan-alasan yang mempertimbangkan baik dari segi pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut dan rasa keadilan bagi terpidana pada khususnya, dan hal layak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik penuntut umum maupun majelis hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta hukum yang berkualitas dan mampu mewujudkan rasa keadilan yang sebenarnya.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku, Penulis berharap setiap menjatuhkan putusan agar majelis hakim lebih memperhatikan teori tujuan

pemidanaan dalam mempertimbangkan besar ringannya suatu perkara pidana, sehingga pidana yang dijalani oleh terhukum berfungsi secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*. Hlm 112.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*. Hlm 82.
- Amir Ilyas , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Amir Ilyas Haeranah, Dkk, 2012, *Bentuk- Bentuk Penyertaan*, Hlm 60.
- Ananda S, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departement pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Hlm 342.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2004, *Teori- Teori dan Kebijakan Dalam Hukum Pidana*. Hlm 51.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori- Teori Kebijakan Pidana*.
- Moeljatno, 1983, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara.
- M. Sholehuddin, 2009, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Hlm 10.

- Ninie suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, CV Armico
- \_\_\_\_\_, 1989, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung,
- R. Abdoel djamili. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. Hlm 396- 397.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung. Hlm 30.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian khusus*, Terjemahan oleh Hasnan BinaCipta, Bandung, 1986.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama. Hlm 118.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung. Hlm 26.